

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, KOMPETENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
TERHADAP KUALITAS INFORMASI  
LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai)**

**Oleh:**

**Manuppan Bangun Tua .s**

**Pembimbing: Taufeni Taufik dan Eka Hariyani**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

e-mail: [upansitumorang@yahoo.com](mailto:upansitumorang@yahoo.com)

*The effect of good governance, human resource competency and internal control  
system toward information quality of local government financial statement*

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze the effect of good governance, human resource competency and internal control system toward information quality of local government financial statement. The population of this research chief financial subsections and financial staff that work on the unit of Work in Dumai city. The sampling technique using purpose sampling. Total respondent in this research are 64 respondent. The data of this research using primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. The result of this study indicates that good governance, human resource competency and internal control system has influence to information quality of local government financial statement. Based on the calculation of the coefficient of determination (Adjusted  $R^2$ ) obtained a value of 0,771. This shows that the influence of the independent variables in the dependent 77,1% and the remaining 22,9% influenced by other variables.*

*Key words : Local Government Financial Statement Quality, Information Value, Good Governance, Competency, Internal Control.*

**PENDAHULUAN**

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola

dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain : Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dikutip dari siapan pers BPK RI perwakilan provinsi Riau. BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengucualian (WDP) atas LKPD kota Dumai. Pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya

sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Namun pada kenyataannya, permasalahan didalam laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik/masyarakat masih menyisakan permasalahan dan keraguan akan kebenarannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau LKPD Kota Dumai bahwa aset tetap, aset lain-lain dan belanja modal dokumen kota Dumai belum didukung oleh bukti dokumen yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas aset tetap dan aset lainnya. Dan BPK RI juga permasalahan kelemahan terkait sistem pengendalian intern kota Dumai, pemilik rekening dan aset tetap kota Dumai tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dikutip dari media online (riauone.com) bahwa serapan anggaran kota Dumai pada 2014 juga belum maksimal. Ini bisa saja dikarenakan sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan belum bekerja secara maksimal.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Azlim dkk, 2012).

Penelitian yang dilakukan Azlim dkk (2012) menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Selain *good governance* faktor kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar dan kriteria nilai informasi laporan keuangan yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008) dalam Sugandhi, (2013).

Penelitian yang dilakukan Fariziah Choirunisah (2008) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Sistem pengendali intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD (Sukmaningrum, 2012).

Penelitian yang dilakukan Dita Arfianti (2011) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Sukmaningrum (2012) dan Azlim dkk (2012), dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah antara lain: Penambahan variabel *good governance* dari Azlim dkk (2012). Alasan peneliti menggunakan

variabel ini adalah karena masih sedikitnya penelitian yang menggunakan variabel *good governance*. Objek yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pada kota Semarang, sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada kota Dumai. Alasan peneliti menggunakan kota Dumai adalah karena masih status LKPD pada Kota Dumai masih WDP dan berdasarkan isu yang sudah di jelaskan sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan ( studi empris pada SKPD kota Dumai).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Untuk menguji pengaruh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan di kota Dumai.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat untuk :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai teori yang menyatakan bahwa *Good governance*, kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

#### 2.Kegunaan Praktisi

##### a.Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan *good governance*, kompetensi SDM dan sistem

pengendalian internal sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pengaruh *good governance*, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## TELAAH PUSTAKA

### Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Kualitas informasi laporan keuangan adalah sesuai untuk dengan kebutuhan pengguna informasi. standar akuntansi pemerintahan menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP 71 2010).

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012) ada 5 indikator dalam kualitas informasi laporan keuangan yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### Good Governance

*Good Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dalam Ruspina (2008) Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya.

Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan

dan mudah dipahami. Schiavo-Campo and Tamosi, (1999) dalam Zeyn (2011).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance*, Osborne and Geabler, (1992) dalam zeyn (2011) adalah : Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

### Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai, Sutrisno (2009)

Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003) dalam Sukmaningrum (2012)

Terdapat empat indikator, yaitu: pemahaman terhadap peraturan dan standar, interaksi dengan sistem, kontrol terhadap SDM dan pendidikan dan training.

### Sistem Pengendalian Intern

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah

sebagai berikut : Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

## **KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Pelaksanaan *Good governance* dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Azlim dkk, 2012) sehingga tercapailah karakteristik kualitatif laporan keuangan diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penelitian yang dilakukan Azlim dkk (2012) pada SKPD pada kota Banda Aceh menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *good governance* yang baik akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang baik pula.

H1: *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang memang memiliki kapasitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar dan kriteria nilai informasi laporan keuangan yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008) dalam (Sugandhi, 2013).

Penelitian yang dilakukan fariziah choirunisah (2008) bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kompeten sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin baik sebaliknya kompetensi sumber daya manusia yang buruk mengakibatkan kualitas informasi laporan keuangan juga akan buruk.

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD (Sukmaningrum, 2012).

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin buruk.

H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Dumai yang berjumlah 33 SKPD. Sampel dalam penelitian ini adalah ara pegawai yang melaksanakan

fungsi akuntansi/keuangan pada SKPD Kota Dumai yang berjumlah 33 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 2 responden dengan kriteria Kasubag keuangan, dan staf keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 66 responden Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*.

## **DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL**

### **Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y1)**

Huang *et al.* (1999) dalam Sukmaningrum (2012) mendefinisikan kualitas informasi adalah sesuai untuk dengan kebutuhan pengguna informasi. standar akuntansi pemerintahan menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012). Variabel ini diukur dengan diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert scale*) yang berkaitan dengan 9 pertanyaan. Kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan 4 indikator, yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### **Good Governance (x1)**

*Good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang

bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*) Osborne dan Geabler, (1992) dalam Zeyn (2011).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governace* (Osborne and Geabler, 1992, OECD and World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2000; 6) dalam Zeyn (2011) adalah (1) transparansi (2) partisipasi (3) akuntabilitas. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Zeyn (2011).

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2)**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut Guy *et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Xu *et al.* dalam Sukmaningrum (2012) mengatakan bahwa interaksi antara sumber daya manusia dan sistem adalah isu penting dalam implementasi sitem yang akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan instrumen yang dibuat

oleh Xu *et al* dalam Sukmaningrum (2012).

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012). Variabel ini diukur dengan diukur dengan menggunakan 4 pertanyaan. Kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan 4 indikator, yaitu: Pemahaman terhadap peraturan dan standar, interaksi dengan sistem, kontrol terhadap SDM, dan pendidikan dan training.

### **Sistem Pengendalian Intern (x3)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sitem Pengendalian Internal mnedefinisikan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Friska Manurung (2014) terdapat lima (5) komponen pada sistem pengendalian internal pemerintah diantaranya : Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan. Sistem pengendalian internal pemerintah dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 22 item pertanyaan sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia yang berdasarkan Friska Manurung (2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kuesioner Dan Demografi

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan digunakan adalah 33 SKPD Kota Dumai. Dengan 66 kuisisioner. Dan kuisisioner yang kembali berjumlah 64 kuisisioner teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode angket, yaitu kuisisioner secara langsung disebar ke seluruh SKPD Kota Dumai. Penyebaran kuisisioner ini berlangsung mulai tanggal 18 Mei 2015 – 28 Mei 2015.

Untuk responden berdasarkan jenis kelamin ini terdiri dari 24 orang responden atau 37,5% adalah laki-laki dan 40 orang responden atau 62,5% adalah perempuan dari total keseluruhan jumlah responden.

Untuk responden berdasarkan umur dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang responden atau 6,25% berumur kisaran 20-24 tahun, 30 orang responden atau 46,87% berumur kisaran 25-35 tahun, 30 orang responden atau 46,87 % berumur diatas 35 tahun.

Untuk responden berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini terdiri dari 14 orang responden atau 21,87% memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA), 10 orang responden atau 15,62 % memiliki tingkat pendidikan Diploma 3 (D3), 37 responden atau 57,81% memiliki tingkat pendidikan strasa 1 (S1) ,3 responden atau 4,68% memiliki tingkat pendidikan S2.

Untuk responden berdasarkan masa jabatan dalam penelitian ini terdiri dari 32 orang responden atau 50 % merupakan kasubag keuangan dan 32 responden atau 50%

merupakan staf keuangan pada SKPD seluruh kota Dumai.

Untuk responden berdasarkan masa jabatan dalam penelitian ini terdiri dari 21 orang responden atau 32,81% telah bekerja selama 1-5 tahun, 18 orang responden atau 28,12% telah bekerja selama 6-10 tahun, 14 orang responden atau 21.87% telah bekerja selama 11-15 tahun, 4 orang responden atau 6,25 % telah bekerja selama 16-20 tahun, dan 4 orang responden atau 6,25% telah bekerja selama 21-25 tahun, 1 orang responden atau 1,56% telah bekerja selama 26-30 tahun, 1 orang responden atau 1,56% telah bekerja selama 31-35 tahun.

### Hasil Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai deskripsi variabel penelitian (kualitas informasi laporan keuangan, *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern) yang disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

### Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan jawaban responden dapat dilihat bahwa kriteria posisi jawaban responden berada pada tingkat 80.65% sehingga dapat diartikan kualitas informasi laporan keuangan pada seluruh SKPD kota Dumai adalah baik.

### Good Governance

Berdasarkan jawaban responden dapat dilihat bahwa kriteria posisi jawaban responden berada pada tingkat 81.77% sehingga dapat dikategorikan *good governance* baik.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan jawaban responden dapat dilihat bahwa kriteria posisi jawaban responden berada pada tingkat 83.59 % sehingga kompetensi sumber daya manusia pada SKPD kota Dumai telah dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dikategorikan baik.

## Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan jawaban responden dapat dilihat bahwa kriteria posisi jawaban responden berada pada tingkat 82.69% sehingga dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern dikategorikan baik.

## Hasil Uji Kualitas Data

### Hasil Uji Validitas

Semua nilai  $r$  hitung untuk masing-masing pernyataan tentang penyajian *good governance*, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan lebih besar dari  $r$  table (0,246). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid karena *pearsoan correlation* lebih besar dari  $R$  table.

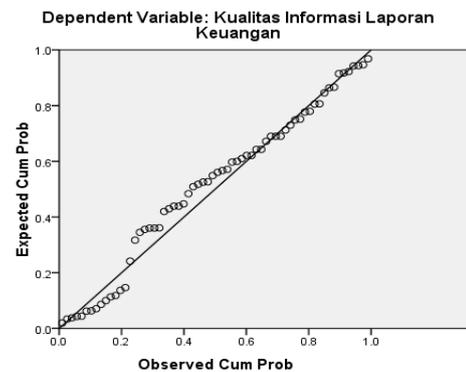
### Hasil Uji Realibilitas

Dari semua nilai ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

## Hasil Uji Normalitas

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Olahan,2015

Dari hasil uji normalitas terlihat data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1.Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Good Governance	.332	3.015
	Kompetensi SDM	.401	2.495
	SistemPengendalian Intern	.353	2.837

a. Dependent Variable: Kualitas InformasiLaporanKeuangan

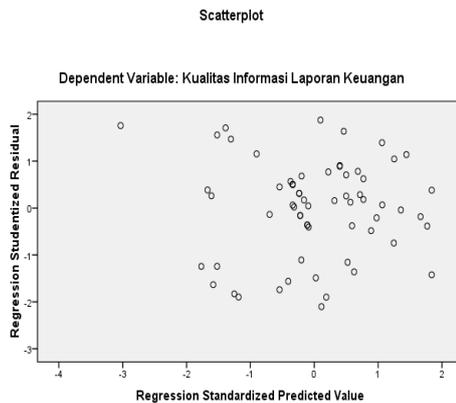
Sumber : Data Olahan,2015

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model

regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

## 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Data Olahan,2015

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

## 3. Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson	Keterangan
1.623	Tidak ditemukannya autokorelasi

Sumber : Data Olahan,2015

Berdasarkan hasil uji autokorelasi Diketahui nilai  $d_{hitung}$  (*Durbin Watson*) terletak antara  $-2$  dan  $+2 = -2 < 1,623 < +2$ .Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

## Hasil Analisis Regresi Berganda

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.356	2.979		-.791	.432
	Good Governance	.434	.099	.459	4.389	.000
	Kompetensi SDM	.528	.237	.212	2.223	.030
	Sistem Pengendalian Intern	.149	.052	.293	2.883	.005

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan,2015

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -2,356 + 0,434 X_1 + 0,528 X_2 + 0,149 X_3 + e$$

## Hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.884 <sup>a</sup>	.782	.771	2.31173

Sumber : Data Olahan,2015

Berdasarkan tabel Diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,771 Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variable independen (*good governance*, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern) terhadap

variable dependen (kualitas informasi laporan keuangan) adalah sebesar 77,1 %. Sedangkan sisanya 22,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yaitu seperti pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja aparatur, faktor eksternal, pengawasan keuangan daerah alat organisasi dan sistem akuntansi pemerintahan yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Dari Tabel dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4.389 > 2.000$  dengan nilai signifikansi diperoleh adalah  $0,000 < 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Jadi kesimpulannya semakin baik penerapan *good governance* akan membuat kualitas informasi laporan keuangan meningkat atau pun semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azlim (2012) yang menyatakan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

### Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.223 > 2.000$  dengan nilai signifikansi diperoleh adalah  $0,030 < 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Choirunisah (2008) dan Zuliarti (2012) menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kompeten sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin baik sebaliknya kompetensi sumber daya manusia yang buruk mengakibatkan kualitas informasi laporan keuangan juga akan buruk.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arfianti (2011) dan sukmaningrum (2012) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Arfianti (2011) dan sukmaningrum (2012), dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat.

### Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,883 > 2,000$  dengan nilai signifikansi diperoleh adalah  $0,005 < 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Arfianti (2011) dan Sukmaningrum (2012) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin buruk.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian karmila (2012) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ketidakkonsistenan ini mungkin dikarenakan perbedaan responden dan tempat penelitian.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berjalan penerapan *good governance* maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik.

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin kompetennya sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan yang akan dihasilkan akan semakin baik pula.

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik.

Koefisien determinasi penelitian ini adalah 0.771 yang memperlihatkan bahwa 77,1% kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern dan sisanya 22.9% oleh variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja aparatur.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim ke responden terpilih. Beberapa responden tidak mengembalikan jawaban kuesioner, demikian juga waktu pengembalian tidak dapat ditentukan. Hal ini berdampak pada jumlah data penelitian yang dapat diperoleh belum maksimal.

Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

## Saran

Memperhatikan adanya beberapa keterbatasan seperti yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka bagi penelitian selanjutnya perlu memperhatikan beberapa saran berikut ini:

Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya SKPD yang terdapat kota Dumai saja namun diperluas menjadi seluruh SKPD yang terdapat diprovinsi Riau.

Dari nilai R square hasil perhitungan dapat diperoleh 77.1 % sedangkan sisanya 22.9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang akan datang perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel independen yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja aparatur.

Untuk SKPD yang ada di Kabupaten Kota Dumai terutama para penyusun laporan keuangan pada masing masing SKPD kota Dumai memiliki latar belakang atau pendidikan yang berbeda-beda (tidak hanya dari akuntansi) dan apabila pegawai ditempatkan pada posisi penyusun laporan keuangan supaya dapat diberi pembekalan dasar dasar akuntansi dan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi*

*Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Volume 1, No. 1 : Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Choirunisah, Fariziah. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kppn Malang Tahun 2008)* tesis, maksi UGM, Yogyakarta

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ruspina, Depi Oktia. 2008. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Sip) Terhadap Penerapan Good Governance*. Skripsi. Universitas Negeri Padang. Padang.

- Sugandi, Joe. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kuansing*. E-Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Riau. Pekanbaru
- Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Kencana
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  
[www.riauone.com](http://www.riauone.com). Diakses 15 desember 2014  
[www.siaranpers.com](http://www.siaranpers.com). BPK RI Perwakilan Provinsi Riau LKPD Kota Dumai
- Zeyn, E., 2011. *Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan*